

BUSANA SEBAGAI SIMBOL STATUS SOSIAL MUSLIM PRIBUMI PADA AWAL ABAD XX

Ilma Nailu Fitriani¹
Eneng Malihatunnajiah²
Farida Novita Rahmah³

¹Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Jakarta, Indonesia.

¹Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Jakarta, Indonesia.

¹Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Jakarta, Indonesia.

ilmanailu625@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran busana sebagai simbol status sosial Muslim pribumi pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana pilihan, bentuk, dan gaya berpakaian menjadi representasi identitas, hierarki sosial, serta respons terhadap pengaruh politik dan budaya kolonial. Metode yang digunakan adalah analisis historis-kultural dengan menelaah arsip kolonial, foto-foto dokumenter, catatan perjalanan, dan karya sastra sezaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa busana tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga sebagai penanda kelas sosial, keislaman, dan afiliasi politik. Pengaruh kolonial memunculkan diferensiasi yang jelas antara pakaian golongan bangsawan, ulama, pedagang, dan rakyat, baik melalui bahan, warna, maupun aksesoris yang dikenakan. Temuan ini menegaskan bahwa busana berperan sebagai media komunikasi non-verbal yang kompleks, mencerminkan dinamika interaksi antara budaya pribumi, Islam, dan kekuasaan kolonial.

Kata Kunci: Awal Abad XX, Busana, Status Sosial, Muslim Pribumi.

PENDAHULUAN

Di Hindia Belanda, pakaian menjadi salah satu aspek penting yang mencerminkan identitas etnis sekaligus menegaskan kelas sosial, sering kali digunakan sebagai simbol status dan jabatan tertentu. Hindia Belanda dihuni oleh beragam kelompok etnis, termasuk orang Belanda, kelompok imigran seperti Tionghoa, Arab, dan lainnya, serta masyarakat pribumi. Setiap kelompok menggunakan pakaian sebagai medium untuk mengekspresikan identitas etnis, menunjukkan status sosial, dan melestarikan budaya mereka. Dengan demikian, cara berpakaian tidak hanya menjadi kebutuhan sehari-hari,

tetapi juga alat komunikasi visual yang mencerminkan posisi seseorang dalam struktur sosial yang kompleks (Nordholt, 2005).

Sepanjang abad ke-20, terjadi perubahan dalam gaya berpakaian di Hindia Belanda yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial (Hati, 2021). Ini termasuk perkembangan mode yang mencerminkan tren global, tetapi juga modifikasi dan adaptasi gaya pakaian. Polemik tentang berpakaian antara Muslim pribumi pada abad ke-20 adalah salah satu contoh konflik budaya dan identitas yang muncul selama masa penjajahan Belanda di Hindia Belanda.

Konflik ini berkaitan dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial terkait pakaian yang wajib dikenakan oleh penduduk pribumi. Pada awal abad ke-20 contohnya, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan yang mewajibkan penduduk, termasuk umat Muslim, untuk mengenakan topi sebagai bagian dari upaya untuk memodernisasi dan mengubah budaya lokal mereka agar lebih sesuai dengan standar Eropa. Kebijakan ini mengharuskan masyarakat untuk melepaskan penggunaan ikat kepala tradisional mereka, seperti blangkon di Jawa, dan menggantinya dengan topi Eropa (Misbahuddin).

Pada awal abad ke-20 ungkapan “reformasi Islam” digunakan untuk pendekatan-pendekatan baru terhadap Islam (Burhanudin, 2005). Sebagai tanggapan terhadap tuntutan kontemporer modernitas (yang seringkali bersifat kolonial). Proses ini dipicu oleh pertemuan kaum Muslim dengan modernitas gaya Eropa. Kaum Muslim yang hidup di bawah pemerintahan kolonial mulai menghadapi perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang signifikan, termasuk penetrasi ide-ide Barat seperti pendidikan sekuler, sistem hukum modern, dan konsep kebangsaan. Hal ini memicu diskusi internal di kalangan intelektual Muslim tentang bagaimana Islam dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan esensinya.

Gerakan reformasi ini bertujuan untuk merevitalisasi Islam melalui reinterpretasi teks-teks suci, menekankan pentingnya pendidikan, dan memperkenalkan pemahaman agama yang lebih rasional dan progresif. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh di Mesir memainkan peran penting dalam menyebarkan gagasan bahwa Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Di Hindia Belanda, pengaruh reformasi Islam ini tampak dalam gerakan organisasi seperti Muhammadiyah,

yang mendukung pendidikan modern, serta Sarekat Islam, yang menggabungkan agenda keagamaan dan sosial-politik. Reformasi ini menandai awal dari proses pembentukan kembali identitas Islam dalam menghadapi kolonialisme dan modernitas, menciptakan perdebatan panjang tentang hubungan antara tradisi dan pembaruan dalam konteks global yang terus berubah (Kaptein, 2014).

Kebangkitan perkotaan modern di Hindia Belanda memunculkan berbagai tantangan baru bagi umat Islam, terutama dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang sebelumnya belum pernah dihadapi. Perubahan ini mendorong mereka untuk mencari kepastian dan penjelasan terkait tatanan sosial yang terus berubah akibat pengaruh modernisasi dan kolonialisme. Fenomena ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan nilai-nilai Islam dengan realitas sosial yang kompleks, sekaligus memperkuat peran agama dalam memberikan panduan dan stabilitas di tengah dinamika masyarakat perkotaan yang berkembang pesat. Seperti pelajar yang telah pulang dari berpendidikan di Barat. Hal itu untuk tetap menjaga gaya hidup Muslim Asia Tenggara atau khususnya Hindia Belanda untuk tetap modern tapi tidak melupakan keislamiannya yang dapat diartikan bahwa Islam tidak menolak gaya kemodernan, namun gaya kemodernan itu akan diterima apabila hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai-nilai Islam atau tidak melenceng dari ketentuan berpakaian umat Muslim (Burhanudin, 2005).

TINJAUAN PUSTAKA

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyinggung keterkaitan antara kolonialisme, Islam, dan simbolisme budaya dalam masyarakat Hindia Belanda. Jajat Burhanudin meneliti bagaimana umat Muslim Asia Tenggara mengajukan permintaan fatwa ke majalah *al-Manar* di Mesir sebagai bentuk respons terhadap modernitas kolonial (Burhanudin, 2005). Meskipun tidak secara langsung membahas busana, penelitian ini memperlihatkan bahwa modernitas Barat turut membentuk ekspresi keagamaan dan budaya umat Islam di Nusantara. Sementara itu, Henk Schulte Nordholt menekankan busana sebagai arena politik identitas yang mencerminkan relasi kuasa antara kolonial Belanda dan masyarakat pribumi (Nordholt, 2005). Pakaian dipahami bukan sekadar pelindung tubuh, tetapi juga sarana untuk menunjukkan posisi sosial dan kepentingan

politik tertentu. Adapun Michael Laffan menyoroti bagaimana kolonialisme membentuk konsep keumatan Muslim Indonesia, di mana simbol-simbol keislaman, termasuk busana, dipakai sebagai penegas identitas politik sekaligus perlawanan terhadap kolonialisme (Laffan, 2003).

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, artikel ini berfokus secara spesifik pada peran busana sebagai simbol status sosial Muslim pribumi pada awal abad ke-20 dengan menelaah arsip kolonial, foto dokumenter, dan karya sastra sezaman. Dengan menggunakan teori identitas sosial yang dikembangkan oleh Tajfel dan Turner, artikel ini menegaskan bahwa busana tidak hanya berfungsi sebagai penanda kelas dan identitas keagamaan, tetapi juga mencerminkan dinamika interaksi antara budaya pribumi, Islam, dan kekuasaan kolonial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sudut pandang yang lebih mikro dan kontekstual mengenai diferensiasi busana di kalangan bangsawan, ulama, pedagang, dan rakyat, yang sebelumnya belum mendapat perhatian secara mendalam dalam kajian terdahulu.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, n.d.). Sumber primer yang peneliti gunakan berupa arsip kolonial, foto-foto dokumenter, catatan perjalanan, dan karya sastra sezaman seperti Delpher.nl dan Archive.org serta berbagai tulisan sebagai sumber sekunder. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan budaya, sebagai metode analisis yang menitikberatkan pada peran budaya dalam membentuk pola pikir, perilaku, serta interaksi sosial dalam suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, budaya bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan akibat interaksi budaya, globalisasi, serta perkembangan teknologi (Hall, 1997).

Sementara teori yang peneliti gunakan adalah teori identitas sosial yang dikembangkan oleh Henri Tajfel dan John Turner yang menjelaskan bahwa identitas seseorang terbentuk melalui keanggotaannya dalam kelompok sosial, yang memengaruhi cara individu memandang dirinya dan orang lain. Teori identitas sosial memberikan kerangka yang relevan untuk memahami dinamika identitas kolektif di

Hindia Belanda, baik dalam konteks budaya, agama, maupun politik (Tajfel, 1986).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sepanjang sejarah, Hindia Belanda terkenal dengan sebutan negara maritim yang multikultur akibat hubungan dagang antar bangsa seperti Eropa, Cina, Arab, dll. Dari hubungan dagang inilah yang mendorong Hindia Belanda untuk mengembangkan budayanya sendiri dengan dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh dari budaya lain (Gumulya, 2017). Adapun pembagian strata sosial pada zaman kolonial terbagi menjadi tiga kasta, pertama golongan *Europeanen* (orang Eropa dan termasuk orang Jepang) sebagai kelas atas, golongan tengah adalah *Vreemde Oosterlingen* (Timur Asing yang termasuk di dalamnya Arab, Tionghoa, Moor, India, dll) sebagai kelas menengah, dan golongan bawah adalah golongan *Inlanders* (Bumiputera) (Gumulya, 2017).

Pada awal abad ke-20, Hindia Belanda mengalami dinamika yang cukup kompleks dalam persoalan budaya berpakaian di kalangan Muslim. Berpakaian menjadi simbol identitas agama dan sosial bagi masyarakat Muslim di tengah upaya kolonial Belanda untuk melakukan kontrol budaya terhadap masyarakat pribumi. Kolonialisme berupaya memodernisasi dan mengubah gaya hidup masyarakat, termasuk aspek berpakaian, agar sesuai dengan standar Barat yang dianggap lebih beradab. Namun, komunitas Muslim di Hindia Belanda menolak asimilasi budaya ini dan mempertahankan identitas berpakaian mereka, yang dianggap sebagai cerminan ajaran Islam dan pemisahan dari budaya kolonial. Para tokoh agama seperti kiai dan ulama memainkan peran penting dalam mempertahankan cara berpakaian yang dianggap Islami, terutama dalam mengenakan sarung, kopiah, dan baju panjang yang sesuai dengan adat dan ajaran Islam (Laffan, 2003).

Menurut Daniel Roche yang dikutip oleh Burke, pakaian dapat dipahami sebagai bentuk politik dalam keseharian, sebab melalui busana atau atribut yang melekat pada tubuh seseorang, tersirat struktur mental serta simbol yang menegaskan kesamaan dalam lapisan sosial tertentu (Burke, 2008). Hal ini sejalan dengan pemikiran Bourdieu yang menekankan bahwa stratifikasi sosial membentuk cara individu mengonseptualisasikan kehidupannya. Kehidupan sehari-hari pada akhirnya menjadi sebuah sistem relasi simbolik di mana, sering kali tanpa disadari, individu membedakan diri sekaligus

mengekspresikan posisi sosial dan keunikannya melalui praktik keseharian (Ludtke, 1995).

Busana Pangreh Praja

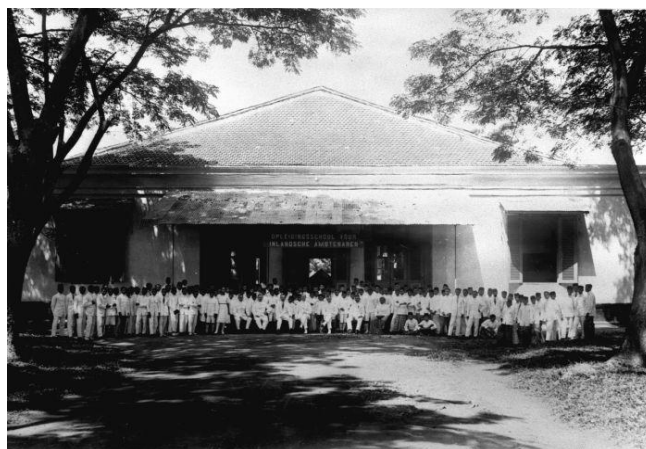
Sejak abad ke-18 sampai awal abad ke-20 (1914) karena derasny kehadiran arus kebudayaan Belanda ke pulau Jawa, muncul golongan sosial baru di kalangan masyarakat kolonial sebagai pendukung kuat kebudayaan campuran (Belanda-Indonesia) di daerah jajahan Hindia Belanda. Terdapat lima masyarakat baru di atas desa, yaitu: golongan pamong praja bangsa Belanda, golongan pegawai Indonesia baru, yang disesuaikan dengan peraturan tahun 1824 tentang penetapan gelar, pangkat, dan kebesaran, golongan pengusaha partikelir Eropa, golongan yang terdiri dari akademis Indonesia (sarjana hukum, insinyur, dokter, guru, ahli pertanian, dan ilmu-ilmu lainnya), dan golongan menengah Indonesia, yaitu para pengusaha Indonesia yang memiliki usaha di bidang perniagaan dan kerajinan. Golongan yang terakhir adalah golongan kaya baru yang posisinya kurang dihargai dan diperhitungkan dibandingkan golongan sebelumnya. Para bangsawan Eropa justru memperlakukan golongan kelima ini sama derajatnya dengan wong cilik (Soekiman, 2000).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat atas hingga bawah, Belanda membentuk tiga jenis struktur pemerintahan. Pertama, pemerintahan yang dijalankan oleh pribumi, dikenal sebagai Pangreh Praja (PP), yang terdiri dari pejabat seperti Bupati, Patih, Wedana, dan Asisten Wedana. Kedua, pemerintahan yang dikendalikan oleh orang-orang Belanda, disebut Binnenland Bestuur (BB), dengan jabatan seperti Gubernur Jenderal, Residen, Asisten Residen, dan Controleur. Ketiga, pemerintahan Zelfbestuur, yaitu kerajaan-kerajaan yang tetap berdiri di luar sistem pemerintahan colonial (Nurcholis, n.d).

Pangreh Praja (PP) (Inlands Bestuur atau Inlandsch Bestuur) merupakan salah satu dari dua bentuk birokrasi pemerintahan di Hindia Belanda selain Binnenlands Bestuur (BB) yang merupakan bentuk birokrasi pemerintahan pada masa Hindia Belanda yang terdiri dari orang-orang Eropa. Inlands Bestuur merupakan birokrasi pelaksana pemerintahan kolonial Belanda di daerah atau birokrasi pada wilayah kekuasaan Belanda

di daerah, dapat juga merupakan kolaborasi antara pemerintahan pusat dengan pemerintah bumi putera di daerah setempat (Sari, 2022).

Pangreh praja digunakan untuk menyebut pejabat-pejabat pribumi yang bekerja untuk mengurus administrasi di bawah pemerintah Kolonial Belanda di tingkat daerah, yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah kolonial dalam mengawasi rakyat. Adapun contoh pangreh praja seperti bupati, patih, wedana, asisten wedana dan camat. Adapun contoh gambar Pangreh Praja seperti gambar di bawah ini:



Gambar 1: Foto bersama siswa sekolah pelatihan (*Opleidingsschool voor Inlandse Ambtenaren*) untuk Menteri Dalam Negeri (Hindia Belanda) di Makassar, Sulawesi tahun 1924. (Foto: Koleksi Tropen Museum).

Pada masa kolonial Belanda, Pangreh Praja, pejabat pribumi yang diangkat oleh pemerintah kolonial memiliki gaya berpakaian yang mencerminkan status dan peran mereka dalam birokrasi. Secara umum, mereka mengenakan baju safari putih dan topi putih yang menyerupai topi baja, sebagai seragam dinas khas mereka. Selain itu, dalam beberapa kesempatan, mereka juga mengenakan pakaian tradisional seperti beskap dan blangkon, atau bahkan setelan jas ala Eropa, menunjukkan perpaduan antara budaya lokal dan pengaruh kolonial dalam penampilan mereka (Santoso, 1993).

Busana Ulama dan Kaum Santri

Pakaian merupakan salah satu penanda paling menonjol dari tampilan luar yang membedakan individu dengan orang lain, bahkan dapat menjadi representasi identitas suatu kelompok. Akibat dominasi kolonial Belanda yang berlangsung lama serta pengaruh penduduk mayoritas Muslim, fungsi pakaian di Hindia Belanda tidak hanya

sekedar menjadi penanda perbedaan dan persamaan di antara masyarakat pribumi, tetapi juga berperan sebagai sarana ekspresi sikap perlawanan terhadap berbagai pengaruh budaya dan politik asing (Qurtuby, 2023). Hingga masa kebangkitan nasional pada awal abad ke-20, tercatat ada 112 pemberontakan yang dilakukan oleh kalangan pesantren. Sebagian besar perlawanan tersebut dipimpin oleh para kiai atau pemimpin tarekat yang umumnya mengenakan jubah, sorban, dan sarung. Contohnya adalah perlawanan Ronggo Prawirodirjo di Madiun, Jawa Timur, perlawanan Pangeran Diponegoro, hingga perlawanan H. Wasyid di Cilegon, Banten, pada tahun 1888.

Sebagai pemimpin pemberontakan dalam Perang Jawa (1825–1830), Pangeran Diponegoro kerap mengenakan jubah dan turban sebagai salah satu gaya berpakaian perangnya. Dalam Babad Dipanegara digambarkan bahwa ia menegaskan identitas keislamannya dengan mengenakan busana khusus untuk Perang Suci, berupa celana, jubah, dan penutup kepala, semuanya berwarna putih. Para tokoh ini tidak hanya menentang kolonialisme di bumi Nusantara, tetapi juga menolak simbol-simbol kolonial, termasuk pakaian dan tradisi Belanda. Gerakan perlawanan dari kalangan pesantren atau kelompok sarungan ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintahan Hindia Belanda (Suparman, 2020).

Di Sumatera, fenomena menarik terkait gaya berpakaian para ulama muncul setelah pemerintah Hindia Belanda memberlakukan pengetatan terhadap pelaksanaan ibadah haji, yang turut membawa masuk budaya Arab beserta simbol-simbol prestisiusnya, seperti gelar haji dan busana khas Arab. Murid-murid awal Syekh Ahmad Khatib, ulama yang mendalami Islam di Mekkah, mempopulerkan gaya busana ala Eropa dan Turki antara lain Haji Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) dan Haji Abdullah Ahmad. Pakaian yang mereka kenakan cukup bervariasi, kadang memadukan jas berkerah tinggi dengan kain sarung atau pantalon, dan pada kesempatan lain mengenakan gaya ala Turki dengan tarbus, meniru penampilan Sultan Mehmed VI serta Mustafa Kemal Pasha. Hal demikian tentunya menuai pro dan kontra di kalangan Kaum Tua yang menganggap Haji Rasul bertentangan dengan jumbuh ulama yang memfatwakan haram untuk bertasyabbuh.



Gambar 2: Contoh pakaian ulama Islam modernis tahun 1923 (Sumber: KITLV, 24 Agustus 2025)

Kelompok Islam modernis yang bermukim di Sumatera Barat berusaha menegaskan identitas mereka sebagai pihak yang berbeda dari ulama tradisional yang masih mempertahankan jenggot. Identitas modernis Kaum Muda ini tercermin melalui gaya berpakaian mereka, seperti setelan jas, pantalon, tarbus, dan atribut lainnya. Selain itu, penampilan mereka juga dilengkapi dengan aksesoris seperti kacamata, dasi, rantai arloji, dan tongkat, yang semakin menegaskan citra modern dan berbeda dari kalangan tradisional. Proses transformasi budaya di Sumatera tampaknya berlangsung inklusif dan cepat dikarenakan penduduknya tidak padat di daerah Jawa, namun terkadang beberapa ulama yang tradisional memilih bersifat eksklusif (Sufyan, 2024). Menurut Nordholt, gejala modernisasi berpakaian di Sumatera Barat sudah muncul bibitnya dari kalangan tokoh nasionalis yang mulai mengadopsi gaya berpakaian, seperti A. rivai, Hatta, dan Sjahrir yang menolak berpenampilan tradisional (Nordholt, 1997).

Puncak perlawanan terhadap gaya berpakaian ala Belanda dari kalangan pesantren atau kaum sarungan terjadi pada Mukhtar NU Ke-2 tahun 1927 di Surabaya. Sebagai organisasi yang baru berusia dua tahun, NU melakukan perlawanan budaya terhadap pemerintah kolonial. Pada saat itu, para petinggi NU mengeluarkan fatwa yang dikenal dengan istilah tasyabbuh (adopsi). Fatwa ini didasarkan pada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa siapapun yang meniru perilaku suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari kaum tersebut. Fatwa tasyabbuh dikeluarkan saat pemerintah Belanda

berupaya mengendalikan fanatisme kalangan pesantren melalui sistem pendidikan ala kolonial. Namun, sekitar tahun 1937, muncul KH Wahid Hasyim yang mulai terbiasa mengenakan pakaian bergaya Belanda.

Dalam berbagai momen penting NU, ia kerap memakai celana panjang, jas, dan dasi yang dipadukan dengan kopiah hitam. Bahkan, pada Mukhtar NU tahun 1936, di hadapan para ulama, KH Wahid Hasyim tampil dengan busana ala Belanda tersebut. Pada akhirnya, meskipun dianggap tradisional dan kurang bergengsi dibandingkan pakaian ala Belanda, sarung tetap memiliki nilai kewibawaan tersendiri. Busana tradisional dengan sarung ini, meskipun terkesan santai, tetap menonjolkan keunikan dan kehormatannya, terutama saat digunakan pada momen salat berjamaah atau perayaan hari raya.

Menurut Kyai Saleh Darat, seorang ulama sebaiknya memiliki kekayaan agar tidak dipandang rendah oleh orang-orang awam. Istilah “orang bodoh” di sini merujuk pada masyarakat umum yang saat itu mengalami eksploitasi besar-besaran oleh kolonial. Kemiskinan dan kebodohan menjadi kondisi umum masyarakat akibat campur tangan kolonial yang berlebihan terhadap kehidupan pribumi. Dalam konteks ini, fashion berperan sebagai identitas pembeda antara ulama dan masyarakat awam. Selain itu, fashion juga menjadi simbol bahwa ulama adalah panutan, teladan, serta sumber inspirasi spiritual bagi umat, tanpa harus meninggalkan aktivitas duniawi (Suparman, 2020).

Busana Kaum Pedagang

Pada awal abad ke-19, masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah pesisir Jawa, Sumatra, dan Makassar, berada dalam arus perdagangan global yang pesat. Pedagang Muslim menjadi kelompok sosial penting karena menghubungkan pusat produksi lokal dengan jaringan dagang internasional. Penampilan mereka tidak hanya menjadi cerminan identitas pribadi, tetapi juga simbol status sosial dan representasi keislaman. Busana yang mereka kenakan menggabungkan unsur lokal dengan nuansa Islam serta pengaruh dari luar melalui kontak dagang yang intensif (Lombard, 2000).

Bagi pedagang laki-laki, sarung batik dan kain tenun lokal adalah busana utama. Batik dengan motif parang, kawung, atau ceplok yang diproduksi di pesisir utara Jawa banyak dipakai untuk menegaskan status sosial mereka. Sebagai atasan, mereka mengenakan baju kurung atau kain panjang longgar yang menyerupai jubah tipis. Penutup

kepala berupa kopiah hitam mulai populer pada periode ini, dipandang sebagai tanda ketaatan agama sekaligus simbol kehormatan. Dalam konteks Jawa, ikat kepala batik atau blangkon tetap dipakai, tetapi perlahan kopiah memperoleh prestise lebih tinggi di kalangan pedagang Muslim (Raffles, 1817).

Raffles dalam *The History of Java* (1817) mencatat bahwa pedagang Jawa yang berada di kota-kota besar cenderung mengenakan pakaian yang lebih halus dibandingkan rakyat biasa. Mereka mengonsumsi kain impor seperti muslin dari India dan sutra dari Tiongkok untuk menunjukkan kekayaan serta jejaring global mereka. Dalam banyak kasus, kain impor ini digunakan sebagai sarung atau selendang bahu, yang fungsinya tidak hanya praktis, tetapi juga simbolik: memperlihatkan hubungan dagang dengan pusat-pusat Islam internasional dan pasar dunia (Raffles, 1817).

Selain itu, penetrasi barang-barang Eropa mulai terlihat dalam busana pedagang elite. Raffles mencatat penggunaan bahan seperti broadcloth dan velvet dalam jaket atau mantel, yang dikenakan pada acara resmi atau pertemuan dengan pejabat kolonial. Pakaian semacam ini memperlihatkan bagaimana pedagang Muslim Indonesia menegosiasikan identitasnya di antara tradisi lokal, Islam, dan kolonialisme Eropa. Penggunaan busana Eropa tidak sepenuhnya menggantikan busana lokal, melainkan menjadi simbol fleksibilitas budaya dan kemampuan beradaptasi (Raffles, 1817).

Kaum perempuan pedagang juga memainkan peran penting dalam representasi busana. Mereka umumnya mengenakan jarit batik dengan motif halus, dipadukan dengan kebaya panjang yang sederhana. Kebaya pada awal abad ke-19 belum dipengaruhi mode Eropa, sehingga masih longgar dan ringan. Selendang sutra atau songket sering ditambahkan untuk menunjukkan status sosial. Denys Lombard mencatat bahwa perempuan pesisir Jawa, khususnya yang terlibat dalam perdagangan, mulai mengenakan kerudung tipis atau penutup kepala sederhana saat berada di ruang publik, sebagai simbol Islamisasi yang berpadu dengan adat lokal (Lombard, 2000).

Penggunaan kerudung di kalangan perempuan pedagang tidak bersifat seragam. Di banyak daerah, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur, kerudung hanya dipakai pada kesempatan tertentu. Namun di Aceh, yang menjadi pusat perdagangan internasional sekaligus kerajaan Islam kuat, penggunaan penutup kepala lebih konsisten. Perbedaan ini menunjukkan variasi praktik berbusana dalam komunitas Muslim Indonesia, yang

dipengaruhi oleh kedekatan dengan pusat kekuasaan Islam dan intensitas interaksi dengan dunia Muslim global (Reid, 2014).

Simbolisme status sosial dalam busana juga sangat jelas. Sarung bermotif batik halus dan kebaya dari kain mahal menjadi penanda kelas atas. Sementara itu, pedagang kecil atau rakyat biasa umumnya hanya mampu mengenakan sarung polos dari tenun lokal dan kebaya sederhana berbahan katun. Dengan demikian, pakaian tidak hanya menunjukkan identitas keagamaan, tetapi juga stratifikasi sosial dalam masyarakat kolonial awal. Perbedaan kualitas kain, motif batik, serta aksesoris pendukung seperti selendang dan perhiasan emas menjadi indikator kelas ekonomi seseorang (Lombard, 2000).

Secara keseluruhan, gaya busana pedagang Muslim Indonesia awal abad ke-19 merupakan hasil sintesis budaya: perpaduan tradisi lokal, simbol keislaman, dan pengaruh global. Kopiah, sarung batik, kebaya panjang, dan kain impor adalah unsur-unsur utama yang memperlihatkan kompleksitas identitas pedagang. Dengan pakaian, mereka tidak hanya menegaskan diri sebagai Muslim, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan perdagangan internasional yang luas. Busana mereka menjadi saksi sejarah tentang bagaimana Islam, perdagangan, dan kolonialisme berinteraksi dalam membentuk wajah kebudayaan Indonesia modern (Raffles, 1817; Lombard, 2000; Reid, 2014).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa busana pada masa kolonial di Hindia Belanda bukan sekadar kebutuhan material, melainkan simbol sosial, identitas keagamaan, dan instrumen politik. Pakaian menjadi sarana komunikasi non-verbal yang menunjukkan diferensiasi antara bangsawan, ulama, pedagang, dan rakyat. Hal ini memperlihatkan bahwa busana mampu mengartikulasikan status sosial sekaligus mempertegas identitas kelompok di tengah dominasi kolonial.

Selain itu, dinamika busana menggambarkan proses negosiasi antara budaya lokal, nilai-nilai Islam, dan pengaruh kolonial. Ulama serta santri mempertahankan sarung, jubah, dan sorban sebagai simbol keislaman dan perlawanan terhadap asimilasi Barat, sementara kelompok modernis Muslim di Sumatra Barat mengadopsi busana Turki maupun Barat untuk menegaskan identitas progresif mereka. Fenomena ini menunjukkan

bahwa busana adalah representasi dari perdebatan antara tradisi dan modernitas dalam tubuh umat Islam di Nusantara.

Peran busana juga berkaitan erat dengan gerakan perlawanan dan pembaruan Islam. Kaum pesantren memaknai pakaian sebagai simbol identitas sekaligus resistensi terhadap kolonialisme, sedangkan pedagang Muslim mengintegrasikan unsur lokal, Islam, dan global sebagai representasi keterhubungan dengan jaringan perdagangan internasional. Dengan demikian, busana berfungsi ganda: sebagai penanda stratifikasi sosial dan sarana ekspresi ideologi yang memperkuat solidaritas kelompok.

Secara keseluruhan, artikel ini memberikan kontribusi pada kajian sejarah budaya dengan menempatkan busana sebagai medium penting dalam membaca dinamika sosial Muslim pribumi di awal abad ke-20. Penelitian ini juga membuka peluang bagi kajian lanjutan, misalnya meneliti bagaimana warisan kolonial memengaruhi pola berpakaian Muslim Indonesia kontemporer dalam konteks globalisasi dan modernitas. Dengan mengaitkan sejarah kolonial dan dinamika busana masa kini, penelitian berikutnya dapat memperkaya diskursus tentang identitas, Islam, dan budaya visual di Indonesia.

REFERENSI

- Al Qurtuby, Sumanto, dkk. *Evolusi Busana di Arab dan Indonesia*. Semarang: eLSA Press, 2023.
- Burke, Peter. *What Is Cultural History?* 2nd ed. Cambridge: Polity, 2008.
- Burhanudin, Jajat. "Aspiring for Islamic Reform: Southeast Asian Request for Fatwas in al-Manar." *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005): 1–30.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. 4th ed. Jakarta: UI Press, n.d.
- Gumulya, Devanny, and Nathalisa Octavia. "Kakian Akulturasi Budaya pada Busana Wanita Cina Peranakan." *Jurnal Ilmu Budaya* 2, no. 1 (2017).
- Hall, Stuart. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London; Thousand Oaks, CA: Sage Publications, in association with The Open University, 1997.
- Hati, Silvia Tabah. *Perubahan Sosial Budaya*. Sumatera Utara, 2021.
- Kaptein, Nico J. G. *Islam, Colonialism and the Modern Age in the Netherlands East Indies: A Biography of Sayyid 'Uthman (1822–1914)*. Leiden: BRILL, 2014.
- Laffan, Michael Francis. *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below the Winds*. London: Routledge, 2003.

- Lombard, Denys. *Nusa Jawa: Silang Budaya II – Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Lüdtke, Alf. *The History of Everyday Life*. Translated by William Templer. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995.
- Misbahuddin, Muhammad. "Priyayi dan Fashion; Perubahan Cara Berpakaian Priyayi Kecil Surakarta 1900–1920." *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 2, no. 1 (2021): 1–16.
- Nordholt, Henk Schulte. *Outward Appearances: Dressing State and Society in Indonesia*. Leiden: KITLV Press, 1997.
- Nordholt, Henk Schulte. *Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Nurcholis, Hanif. *Sejarah Pemerintahan Lokal/Daerah di Indonesia*. Jakarta: Pustaka, n.d.
- Raffles, Thomas Stamford. *The History of Java*. London: Black, Parbury and Allen, 1817.
- Reid, Anthony. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450–1680, Jilid II: Jaringan Perdagangan Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Santoso, Priyo Budi. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural*. Depok: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Sari, Dewi Erista. "Perkembangan Pangreh Praja Tahun 1905–1930 di Hindia Belanda." Skripsi, 2022.
- Soekiman, Djoko. *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa, Abad XVIII–Medio Abad XX*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000.
- Sufyan, Fikrul H. "Fesyen Ulama Modernis Mengguncang Sumatera Utara." *Republika*, 12 Agustus 2024. <https://www.republika.id/posts/58733/>.
- Suparman. "Gaya Busana Identitas Ulama Sunda 1800–1998." *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 17, no. 1 (2020).
- Tajfel, Henri, and John C. Turner. "The Social Identity Theory of Intergroup Behavior." In *Psychology of Intergroup Relations*, edited by Stephen Worchel and William G. Austin, 7–24. Chicago: Nelson-Hall, 1986.